

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Patoni. (2017). *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boedi Harsono, (2002). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, isi, dan Pelaksanaan*. Djambatan, Jakarta.
- Hadimulyo, (2017). *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, (2003). *Kapasitas Hukum Hak Atas Tanah Indonesia*, Arkola Surabaya,
- Jhon Salihendo, (2014). *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartasaputra, (2015), *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.
- R. Bintaro, (2019). *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ralph Linton, (2014). *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali
- Rusmadi Murad, (2019). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Sarjita. (2015). *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugujogja Pustaka: Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, (2010). *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali
- Susanti Adi Nugroho, (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT.Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta
- Suyud Margono, (2000). *ADR dan Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Urip Santoso, (2020). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Widjaja, HAW., (2013). *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

B. Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang pendaftaran tanah, hak atas tanah, hak pengelolaan, dan satuan rumah susun

Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Skripsi dan Jurnal

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik* , vol I, No. 6

Jumaat, Siti Rahmah, Zul Aidy, Peran Kepala Gampong (Keuchik) Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kecamatan Singkil. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 7 No 9 Tahun 2024

Hasim Purba. Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan. *Jurnal Law Review*, V. X No 2. UPH, 2010, hlm. 167.

Maki, G.H., Lambonan, M.L., & Lawotjo, S. Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerinta Kabupaten\Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lex Privatum Vol.14 No.03 Sept 2024*

Siregar, E.M., Yamin, M., Zaidar., & Sembiring, I.A. Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4, April 2023*

D. Internet

Firmansyah, Nurul. *Menakar Peradilan Desa Adat Dalam UU Desa*. 2014.
<https://www.huma.or.id/uncategorized-id/menakar-peradilan-desa-adat-dalam-uu-desa>

<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, diakses pada tanggal 26 September 2024 Pukul 20.03 WIB